

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(DISDUKCAPIL)
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jl. W.R. Supratman, Nanga Bulik ☎ [0532] 2071039 Fax [0532] 2071039

Nanga Bulik, April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan W.R Supratman No. 54 Nanga Bulik 74662 Telp (0532) 20710414 Fax (0532) 2071039
Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id> email : disdukcapil@lamandaukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 900/47/DUKCAPIL/IV/2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);

26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025, Tanggal Penetapan 28 Mei 2025 Tanggal Pengundangan 28 Mei 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 Nomor 999).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025**
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal , 30 April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau



TURMUDI, S. Hut.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikan tersebut.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan selanjutnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Nanga Bulik, 30 April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau



TURMUDI, S. Hut.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran PD s.d Triwulan II TA. 2024	9
2.2. Evaluasi Renja PD s.d Triwulan II TA. 2024 Penyajian Menggunakan Formulir E.81	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD	17
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan ,program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2024 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 yang memuat kebijakan ,program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama 1 tahun dengan memperhatikan Latar Belakang, Visi dan Misi, Isu-Isu dan Masalah Mendesak, Arah Kebijakan Program, Keterkaitan Dengan Program Provinsi dan Pusat, Kondisi Saat Ini, Target dan Sasaran, Program dan Kegiatan serta Program Prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kabupaten Lamandau Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja
2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja
3. Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja
4. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
5. Perumusan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja
6. Penetapan Rencana

Fungsi Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana yang menjadi tugas pokok adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 mengacu kepada beberapa peraturan sebagai landasan hukum seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025, Tanggal Penetapan 28 Mei 2025 Tanggal Pengundangan 28 Mei 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 Nomor 999).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran di Kabupaten Lamandau.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih berdayaguna dan berhasilguna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyajian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang meliputi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN LALU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025

2.2 Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Penyajian
Menggunakan Formulir E.81

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU

Pada Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan. Matrik Program dan Kegiatan pada Bab ini di peroleh dari hasil penginputan pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)

BAB. IV. PENUTUP

Pada Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Evaluasi indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025 melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penetapan indikator Tujuan dan Sasaran merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Tujuan dan Sasaran meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran

Pengukuran capaian indikator tujuan dan sasaran dilakukan dengan menggunakan formula indikator tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data terkait pencapaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Review hasil Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Laporan Capaian Kinerja Pembangunan yang dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
I.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Indeks Skala Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,044	-	83,46	85,49	-
2	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan	71,89	-	-	-	-
3	Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	96,72	98,87	89,58	-
4	Penduduk Berakta Kelahiran	-	105	170	92,67	-
5	Jumlah Pasangan berakte Nikah	-	30374	30975	35.419	-
6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	-	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
7	Penerapan KTP Nasional	-	Sudah	Sudah	Sudah	-
8	Penduduk Berakta Kelahiran	-	57,69	97,98	56,53	-
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	-	577	979,8	565	-

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	3,43
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	85,49
12	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	-	-	-	100,0
13	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	-	-	-	-	100,0
14	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	-	-	-	-	100,0
15	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Usia 0-17 Tahun	-	-	-	-	97,34
16	Perekaman KTP-el	-	-	-	-	99,28
17	Penduduk berakta kelahiran	-	-	-	-	57,57
18	Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	-	76,03
19	Buku Pokok Pemakaman (BPP)	-	-	-	-	97,7
20	Perjanjian Kerjasama (PKS)	-	-	-	-	17

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
21	Akses Data	-	-	-	-	2
22	Inovasi	-	-	-	-	3
23	IKD	-	-	-	-	8,23

Nanga Bulik, April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau,



TURMUDI, S. Hut
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

2.2 Evaluasi Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029 yang menjadi tujuan utama adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, sehingga berbagai sasaran program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan kegiatannya adalah lanjutan pelaksanaan e-KTP dan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berbasis elektronik sampai dengan saat sekarang sebagai program pusat (gratis) dan selanjutnya menjadi program daerah (mandiri) hingga sekarang ini.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tahun 2025 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja Triwulan I tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 - 2026 disampaikan dalam **Tabel 2.2/Tabel E.81** berikut ini :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
Periode Pelaksanaan : Maret 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RRPD :

1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: 84,46
2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	: 100,0
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	: 100,0
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	: 100,0
5	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Usia 0-17 Tahun	: 98,5
6	Perekaman KTP-el	: 99,50
7	Penduduk berakta kelahiran	: 98,3
8	Kartu Identitas Anak (KIA)	: 55,0
9	Buku Pokok Penakaman (BPP)	: 60,0
10	Perjanjian Kerjasama (PKS)	: 15
11	Akses Data	: 15
12	Inovasi	: 2
13	IKD	: 50,0

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun 2025) Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6*12		14=13/5x100%		15	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM																								
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																								
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.843.765.057		7.234.080.564		8.225.236.895		1.419.895.519		0		0		0		0		7.234.080.564		123,79		Disuducapil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	5.084.332.202	100%	6.561.037.115	100%	7.300.970.002	100%	1.360.394.433	100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	6.561.037.115	100%	129,04		Disuducapil		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	362.000.000	0%	146.509.926	100%	173.671.785	100%	25.811.260	100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	146.509.926	100%	40,47		Disuducapil		
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	35.000.000	-	34.988.095	5	60.027.290	5	6.043.440	5	0	5	0	5	0	5	0	5	34.988.095	5	99,97		Disuducapil	
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5	65.000.000	-	14.468.975	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	14.468.975	5	22,26		Disuducapil	
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5	57.000.000	-	34.614.703	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	34.614.703	5	60,73		Disuducapil	
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	5	65.000.000	-	11.312.325	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	11.312.325	5	17,40		Disuducapil	
		5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahn DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5	55.000.000	-	10.462.400	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	10.462.400	5	19,02		Disuducapil	
		6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	50.000.000	-	29.509.378	5	51.254.570	5	9.671.320	5	0	5	0	5	0	5	0	5	29.509.378	5	59,02		Disuducapil	

			7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	35.000.000	-	11.154.050	5	62.389.925	5	10.096.500	5	0	5	0	5	0	5	11.154.050	5	31,87	Disdukcapil	
			II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan tingkat administrasi perkantoran	100%	2.612.724.584	100%	3.158.554.929	100%	3.879.511.537	100%	919.427.473	100%	-	100%	-	100%	-	100%	3.158.554.929	100%	120,89	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	2.612.724.584	1	3.158.554.929	1	3.879.511.537	350	919.427.473	350	0	350	0	350	0	350	3.158.554.929	350	120,89	Disdukcapil	
			III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan tingkat administrasi perkantoran	100%	175.000.000	100%	113.285.950	100%	221.349.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	113.285.950	100%	64,73	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	75.000.000	75	65.960.000	75	129.384.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	65.960.000	2	87,95	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Peatihan	7	100.000.000	12	47.325.950	12	91.965.000	7	0	7	0	7	0	7	0	7	47.325.950	7	47,33	Disdukcapil	
			IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan tingkat administrasi perkantoran	100%	248.800.000	100%	1.058.740.590	100%	625.459.184	100%	73.402.842	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1.058.740.590	100%	425,54	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	10.000.000	12	6.003.348	12	5.531.700	1	5.425.000	1	0	1	0	1	0	1	6.003.348	1	60,03	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	135.000.000	12	779.941.775	12	395.109.388	10	0	10	0	10	0	10	0	10	779.941.775	10	577,73	Disdukcapil	
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	7.500.000	12	5.778.000	12	7.807.956	1	2.987.956	1	0	1	0	1	0	1	5.778.000	1	77,04	Disdukcapil	
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4	7.500.000	12	24.973.000	12	32.255.000	4	3.730.400	4	0	4	0	4	0	4	24.973.000	4	332,97	Disdukcapil	
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	2	4.000.000	12	15.442.058	12	12.497.140	2	3.368.436	2	0	2	0	2	0	2	15.442.058	2	386,05	Disdukcapil	
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	3	4.800.000	12	5.550.000	12	7.800.000	3	900.000	3	0	3	0	3	0	3	5.550.000	3	115,63	Disdukcapil	
			7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	80.000.000	12	221.052.409	12	164.458.000	100	56.991.050	100	0	100	0	100	0	100	221.052.409	100	276,32	Disdukcapil	
			V. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan tingkat administrasi perkantoran	100%	200.000.000	100%	750.607.340	100%	753.000.000	100%	26.300.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	750.607.340	100%	375,30	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1	50.000.000	1	459.650.000	1	43.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	459.650.000	1	919,30	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	150.000.000	3	290.957.340	1	710.000.000	1	26.300.000	1	0	1	0	1	0	1	290.957.340	1	193,97	Disdukcapil	
			VI. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan tingkat administrasi perkantoran	100%	1.390.807.618	100%	1.119.298.229	100%	1.385.348.496	100%	274.238.258	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1.119.298.229	100%	80,48	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15.000.000	1.000	10.000.000	####	9.300.000	1	3.100.000	1	0	1	0	1	0	1	10.000.000	1	66,67	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	3	228.500.000	12	123.456.692	12	242.950.000	3	28.973.063	3	0	3	0	3	0	3	123.456.692	3	54,03	Disdukcapil	

			3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4	1.147.307.618	12	985.841.537	12	1.133.098.496	4	242.165.195	4	0	4	0	4	0	4	985.841.537	4	85,93	Disdukcapil	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah VII. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	95.000.000	100%	214.040.151	100%	262.630.000	100%	41.214.600	100%	-	100%	-	100%	-	100%	214.040.151	100%	225,31	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara, Biaya Pemelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	50.000.000	2	81.826.025	9	131.770.000	10	32.114.600	10	0	10	0	10	0	10	81.826.025	10	163,65	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	25.000.000	250 M3	108.964.126	400 M3	94.240.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	108.964.126	1	435,86	Disdukcapil	
			3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25	20.000.000	12	23.250.000	12	36.620.000	25	9.100.000	25	0	25	0	25	0	25	23.250.000	25	116,25	Disdukcapil	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100%	508.152.548	100%	472.310.682	100%	346.513.553	100%	34.964.786	100%	-	100%	-	100%	-	100%	472.310.682	100%	47,75	Disdukcapil	
			I. Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Blangko dan Formulir Dokumen Kependudukan	100%	250.000.000	100%	228.307.500	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	228.307.500	100%	91,32	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	2500	250.000.000	22.736	228.307.500	-	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	228.307.500	2500	91,32	Disdukcapil	
			II. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KK, KTP, KIA	100%	258.152.548	100%	244.003.182	100%	346.513.553	100%	34.964.786	100%	-	100%	-	100%	-	100%	244.003.182	100%	94,52	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25	85.000.000	7	84.665.374	-	109.365.000	25	10.380.550	25	0	25	0	25	0	25	84.665.374	25	99,61	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran kependudukan	500	95.000.000	300	84.894.225	-	87.802.000	500	3.996.600	500	0	500	0	500	0	500	84.894.225	500	89,36	Disdukcapil	
			3. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	10	78.152.548	400	74.443.583	400	149.346.553	10	20.587.636	10	0	10	0	10	0	10	74.443.583	10	95,25	Disdukcapil	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan	100%	180.000.000	100%	159.223.767	100%	451.558.740	100%	10.536.300	100%	-	100%	-	100%	-	100%	159.223.767	100%	88,46	Disdukcapil	
			I. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Blangko dan Formulir Dokumen Kependudukan	0	-	0	-	100%	253.500.000	100%	10.536.300	100%	-	100%	-	100%	-	100%	159.223.767	100%	#DIV/0!	Disdukcapil	
			1. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tersedia	-	0	0	0	2500	253.500.000	-													
			II. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Laporan Data Pencatatan Sipil	100%	180.000.000	100%	159.223.767	100%	198.058.740	100%	3.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	76.112.300	100%	42,28	Disdukcapil	
			1. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan sipil	25	85.000.000	-	83.111.467		114.150.000	25	7.536.300	25	0	25	0	25	0	25	83.111.467	25	97,78	Disdukcapil	
			2. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	350	95.000.000	-	76.112.300		83.908.740	350	3.000.000	350	0	350	0	350	0	350	76.112.300	350	80,12	Disdukcapil	

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Yang Terpasilitasi	100%	71.280.307	100%	41.509.000	100%	126.194.600	100%	14.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	41.509.000	100%	58,23	Disdukcapi	
			I. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Jenis Data Kependudukan Yang Valid	100%	71.280.307	100%	41.509.000	100%	126.194.600	100%	14.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	41.509.000	100%	58,23	Disdukcapi	
			1. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	35.000.000	9	32.074.000	9	69.970.000	3	14.000.000	3	0	3	0	3	0	3	0	3	32.074.000	3	91,64	Disdukcapi	
			2. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	36.280.307	-	9.435.000	-	56.224.600	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	9.435.000	1	26,01	Disdukcapi	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											10,54															
Predikat Kinerja											Sangat Rendah (SR)															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : -																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Berikutnya : -																										

Disusun
Nanga Bulik, April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau,



TURMUDI, S. Hut
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

BAB III**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Perumusan Perubahan Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tahun 2025 mencakup 4 (empat) program terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yaitu :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	7.043.873.392
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	81.168.458
a.	Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	39.371.263
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5	0
c.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5	0
d.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA - SKPD	5	0
e.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5	0
f.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	22.405.050

	g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	19.392.145
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	3.879.511.544
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nanga Bulik	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	3.879.511.544
	3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	199.494.000
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Nanga Bulik	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	129.384.000
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nanga Bulik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Peatihan	7	70.110.000
	4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	525.720.894
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nanga Bulik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	5.531.700
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nanga Bulik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10	379.366.588
	c. Penyediaan peralatan rumah tangga	Nanga Bulik	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	7.807.956
	d. Penyediaan bahan Logistik Kantor	Nanga Bulik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4	26.982.000
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nanga Bulik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	2	9.932.650
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	3	7.800.000
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	88.300.000
	5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	710.000.000
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nanga Bulik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1	0

	b.	Penggadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nanga Bulik	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	710.000.000
	6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	1.385.348.496
	a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	9.300.000
	b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	3	242.950.000
	c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4	1.133.098.496
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nanga Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	262.630.000
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nanga Bulik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara, Biaya Pemeliharaan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	131.000.000
	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Nanga Bulik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	94.240.000
	c.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Nanga Bulik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	36.620.000
2.		Program Pendaftaran Penduduk	Nanga Bulik	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100%	201.260.371
	1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Laporan Data Kependudukan	100%	201.260.371
	a.	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nanga Bulik	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25	85.028.400
	b.	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Nanga Bulik	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran kependudukan	500	55.325.975

	c. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Nanga Bulik	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	10	60.905.996
3.	Program Pencatatan Sipil	Nanga Bulik	Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan	100%	321.791.861
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Nanga Bulik	Jumlah Blangko dan Formulir Dokumen Kependudukan	100%	181.338.500
	a. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tersedia	2500	181.338.500
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Nanga Bulik	Jumlah Dokumen Laporan Data Pencatatan Sipil	100%	140.453.361
	a. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Nanga Bulik	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan sipil	25	85.554.600
	b. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Nanga Bulik	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	350	54.898.761
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nanga Bulik	Persentase Data Yang Terfasilitasi	100%	103.616.900
	1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nanga Bulik	Persentase Database Jenis Data Kependudukan Yang Valid	100%	103.616.900
	a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	69.970.000
	b. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nanga Bulik	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	33.646.900

BAB V

P E N U T U P

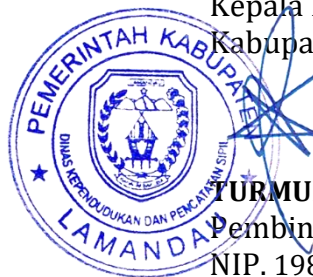
Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025, ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 - 2029. Pada dasarnya Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 mengurai target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 mencakup 4 (empat) program terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan untuk mencapai 1 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Dengan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamandau untuk tahun 2025 serta untuk melanjutkan dan meletakkan kerangka dasar pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau



TURMUDI, S. Hut.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198011152006041010

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LAMANDAU TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								5.823.383.216,00	8.225.236.895,00	7.670.542.524,00	1.847.159.308,00							5.843.765.057,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.823.383.216,00	8.225.236.895,00	7.670.542.524,00	1.847.159.308,00							5.843.765.057,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.823.383.216,00	8.225.236.895,00	7.670.542.524,00	1.847.159.308,00							5.843.765.057,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 100 % persen	100 100 % persen	5.143.342.956,00	7.300.970.002,00	7.043.873.392,00	-59.010.754,00							5.084.332.202,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	362.000.000,00	173.671.785,00	81.168.458,00	-280.831.542,00			-	- -	-		362.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	35.000.000,00	60.027.290,00	39.371.263,00	4.371.263,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			57.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	51.254.570,00	22.405.050,00	-27.594.950,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	62.389.925,00	19.392.145,00	-15.607.855,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	2.612.724.584,00	3.879.511.537,00	3.879.511.994,00	1.266.787.410,00			-	- -	-		2.612.724.584,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/ bulan	350 Orang/ bulan	2.612.724.584,00	3.879.511.537,00	3.879.511.994,00	1.266.787.410,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.612.724.584,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	186.200.000,00	221.349.000,00	199.494.000,00	13.294.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	61.200.000,00	129.384.000,00	129.384.000,00	68.184.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	125.000.000,00	91.965.000,00	70.110.000,00	-54.890.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	233.610.754,00	625.459.184,00	525.720.444,00	292.109.690,00			-	- -	-		248.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	5.531.700,00	5.531.700,00	-2.968.300,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	121.310.754,00	395.109.388,00	379.366.588,00	258.055.834,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.807.956,00	7.807.956,00	307.956,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	32.255.000,00	26.982.000,00	19.482.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	12.497.140,00	9.932.650,00	5.932.650,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	3.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	80.000.000,00	164.458.000,00	88.299.550,00	8.299.550,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	216.500.000,00	753.000.000,00	710.000.000,00	493.500.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	116.500.000,00	43.000.000,00	0,00	-116.500.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	610.000.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	1.407.307.618,00	1.385.348.496,00	1.385.348.496,00	-21.959.122,00			-	- -	-		1.390.807.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-700.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	242.950.000,00	242.950.000,00	-7.050.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			228.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.147.307.618,00	1.133.098.496,00	1.133.098.496,00	-14.209.122,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.147.307.618,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	125.000.000,00	262.630.000,00	262.630.000,00	137.630.000,00			-	- -	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	131.770.000,00	131.770.000,00	56.770.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	94.240.000,00	94.240.000,00	64.240.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	20.000.000,00	36.620.000,00	36.620.000,00	16.620.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100 %	100 %	238.759.953,00	346.513.553,00	201.260.371,00	19.392.595,00							258.152.548,00	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	[deleted] Jumlah Dokumen Laporan Data Kependudukan Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 persen 25 Laporan	100 persen 25 Laporan	238.759.953,00	346.513.553,00	201.260.371,00	-37.499.582,00			-	- -	-		258.152.548,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	109.365.000,00	85.028.400,00	10.028.400,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				500 Dokumen	500 Dokumen	85.000.000,00	87.802.000,00	55.325.975,00	-29.674.025,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				10 Dokumen	10 Dokumen	78.759.953,00	149.346.553,00	60.905.996,00	-17.853.957,00	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.152.548,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan				100 %	100 %	375.000.000,00	451.558.740,00	321.791.861,00	55.000.000,00							430.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	215.000.000,00	253.500.000,00	181.338.500,00	-33.661.500,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2500 Paket	2500 Paket	215.000.000,00	253.500.000,00	181.338.500,00	-33.661.500,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Laporan Data Pencatatan Sipil				100 persen 100 Tahun	100 persen 100 Tahun	160.000.000,00	198.058.740,00	140.453.361,00	-19.546.639,00			-	- -	-		180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				25 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	114.150.000,00	85.554.600,00	10.554.600,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				350 Laporan	350 Laporan	85.000.000,00	83.908.740,00	54.898.761,00	-30.101.239,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Yang Terfasilitasi				100 %	100 %	66.280.307,00	126.194.600,00	103.616.900,00	5.000.000,00							71.280.307,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Jenis Data Kependudukan yang Valid				100 persen 100 Tahun	100 persen 100 Tahun	66.280.307,00	126.194.600,00	103.616.900,00	37.336.593,00			-	- -	-		71.280.307,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	69.970.000,00	69.970.000,00	39.970.000,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	36.280.307,00	56.224.600,00	33.646.900,00	-2.633.407,00	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.280.307,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								5.823.383.216,00	8.225.236.895,00	7.670.542.524,00	53.034.846.051,00							5.843.765.057,00	